

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawalan atau pengawasan atas belanja daerah perlu mendapat perhatian warga, termasuk belanja beasiswa yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Pengawasan antara lain dapat ditingkatkan melalui proses transparansi, baik transparansi proses mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban maupun transparansi atas keluaran (output). Lemahnya transparansi dapat berdampak penyalahgunaan beasiswa, fraud dan tidak sampainya manfaat keuangan yang seharusnya diterima mahasiswa.

Penelitian ini mengkaji pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah Deiyai kepada mahasiswa Asli Deiyai Jenis beasiswa yang diberikan adalah beasiswa akhir studi, yang diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam penulisan tugas akhir seperti Tesis, Skripsi dan Makalah. Beasiswa ini diberikan kepada Mahasiswa asal kabupaten Deiya jumlah mahasiswa pada tahun 2022. Beasiswa telah diberikan untuk Penyelesaian Studi akhir. mahasiswa sejak tahun 2008 Pada tahun 2022 sejumlah 106 orang telah menyelesaikan studi dan memperoleh bantuan beasiswa ini.

Terselenggaranya good governance adalah setiap pelajar pemerintahan dapat memenuhi keinginan rakyat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu perlu dibangun dan dilaksanakan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas, terukur dan sah, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara efektif, efisien, bersih, akuntabel, serta bebas dari korupsi, konspirasi, dan nepotisme. . Tentunya

untuk mencapai program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengelolaan bidang pendidikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat. Dampak Pencapaian HDI (*Human Achievement Index*) di Deiyai .

Good Governance Tata pemerintahan yang baik atau good governance merupakan paradigma baru yang saat ini berkembang di Indonesia. Menurut Sj. (No. Judul 2024) Konsep penyelenggara di sini adalah mekanisme, kebijakan dan prosedur dimana pemerintah dan warga negara dapat mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam konsep manajemen, dewan hanyalah salah satu aktor dan tidak selalu merupakan aktor yang paling menentukan. Akibatnya, peran negara berubah dari sekedar pemberi pembangunan dan pelayanan menjadi fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta lainnya dalam pelaksanaan upaya tersebut.

Perkembangan Penyelenggara bersifat kompleks dan terdapat kendala yang besar, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mulai memperbarui kebijakan Penyelenggara. Reformasi administrasi akan lebih mudah dilaksanakan jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Pembaruan penyelenggaraan pelayanan publik dapat digunakan sebagai titik awal dan praktik penyemangat bagi penyelenggara yang mendorong perubahan. Pelayanan publik dipilih sebagai faktor utama, karena memungkinkan untuk mewujudkan secara lebih realistis dan mudah upaya mewujudkan nilai-nilai yang diperkenalkan oleh penyelenggara dalam pelayanan publik. Nilai-nilai

seperti efisiensi, keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi. Aspek transparansi dinilai penting karena mengacu pada situasi dimana seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang memerlukan. Transparansi masih merupakan sebuah kemewahan sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya. Meskipun transparansi adalah salah satu langkah terpenting bagi penyelenggara. Suatu cara pengelolaan dinilai baik atau buruk salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi dalam pengelolaannya.

Masih banyak pelayanan publik yang kebutuhannya tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat yang menggunakannya. Masyarakat seringkali tidak mendapat informasi mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penyelenggara harus transparan dan memastikan pemangku kepentingan mempunyai akses terhadap berbagai informasi tentang proses kebijakan publik, alokasi anggaran pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh informasi tentang administrasi publik yang dapat memudahkan upaya masyarakat dalam pembuatan kebijakan. evaluasi. . pemerintah untuk kepentingan umum. Seperti yang dinyatakan dalam (Peraturan No. 48 tahun 2008) tentang transparansi informasi publik, yang memastikan bahwa pengguna layanan memiliki akses ke informasi. Penyedia layanan wajib melihat dan membaca informasi yang disajikan dalam paket dan format yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik dan non-elektronik.

Faktanya, seringkali pengguna tidak menyadarinya karena tidak dapat membaca, memahami atau bahkan melihat newsletter yang ada karena ditempatkan di lokasi yang tidak strategis. Oleh karena itu, penyedia layanan harus mengklarifikasi ulang, atau setidaknya mengkaji ulang, permasalahan yang sangat penting ketika berkomunikasi dengan pengguna, seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk proses layanan. Merupakan tanggung jawab penyedia layanan untuk menjelaskan kepada pengguna berbagai aspek penting dalam proses penyediaan layanan publik.

Selain itu, (Okusa 2008) mengatakan bahwa penyelenggara seringkali merasa tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi tentang persyaratan akhir mahasiswa yang harus diikuti oleh pengguna. Mereka menganggap bahwa pengetahuan tentang persyaratan layanan sepenuhnya merupakan urusan pengguna layanan dan bukan bagian dari tanggung jawab dan peran mereka sebagai penyedia layanan. Walaupun mereka merasa perlu untuk menjelaskan ketentuan layanan, mereka dapat melakukannya cukup dengan menempelkannya di papan di ruang tunggu atau di sekitar area layanan. Bagi mereka, pemeliharaan papan pengumuman ini dirasa cukup. Transparansi adalah keterbukaan terhadap seluruh kegiatan dan kebijakan pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan berarti keterbukaan dalam mengelola kegiatan. Di lembaga pendidikan harus ada transparansi yang jelas di bidang pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yakni. sumber dan jumlah keuangan, rincian penggunaan dan tanggung jawab, sehingga lebih mudah bagi yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Rahul Richa dkk. 2021)

Transparansi, menurut Mardiasmo, berarti keterbukaan pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan.

Pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan seluruh program pendidikan di sekolah. Tujuan dari transparansi adalah untuk menciptakan keyakinan pada penyelenggara bahwa pendidikan adalah organisasi penyelenggara layanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak bebas korupsi, dan berwibawa dalam hal profesionalisme. Transparansi bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara sekolah dan masyarakat dengan menjamin kecukupan informasi dan kemudahan akses terhadap informasi yang benar (Marham 2017).

Merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan dukungan pendidikan nasional bebas KKN sesuai standar nasional pendidikan, Deiyai Pemkab memperkenalkan (delapan) standar pendidikan nasional. yaitu: standar isi, standar proses, standar kualifikasi kelulusan, standar pelatih dan tenaga pelatihan, standar proposal dan infrastruktur, standar tata kelola, standar keuangan dan standar evaluasi pelatihan, yang menerapkan delapan standar tersebut. Demikian disampaikan Kepala Pemerintahan (Bupati) Kabupaten Deiyai, Ateng Edowai, S.Pd.K, M.Pd menawarkan bantuan berupa beasiswa kepada Deiyai

Mahasiswa Kabupaten untuk mahasiswa yang berhasil pada Kurikulum Sarjana (S1) dan (D3)

Melihat kepengurusan Deiyai saat ini Sekilas tentang administrasi saat ini dari pendidikan, budaya, pemuda dan kantor olahraga, penerima manfaat besar sering menghadapi hambatan dalam mengakses informasi beasiswa dan layanan yang disediakan juga tidak optimal. Dan transparansi proses pemberian layanan adalah bagaimana mengukur tingkat transparansi proses pemberian layanan publik.

Penilaian tingkat transparansi di sini mencakup keseluruhan proses pelayanan publik, termasuk persyaratannya, rincian alokasi anggaran dan waktunya, serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus diikuti. Penyelenggaraan beasiswa oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Deiyai Kabupaten Administrasi Gateful beasiswa bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dasar dan D3 bagi mahasiswa sudah berjalan dengan baik, dengan kata lain belum efektif.

Hal ini ditunjukkan dalam pemberian layanan, khususnya dalam pengalokasian dana beasiswa yang beredar. Sedangkan permasalahannya, Gubernur Deiyai sudah mengumumkan akan memberikan dukungan setiap tanggal 15 April dan seterusnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Deiyai Manajemen Mahasiswa Kabupaten Pascasarjana Kota Jayapura”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut .:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa asal Deiyai di Jayapura tentang pengelolaan bantuan studi akhir ?
2. Apa tanggapan badan pengurus Tujuh Ikatan Mahasiswa asal Deiyai di Jayapura tentang pengelolaan bantuan studi akhir ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan persepsi mahasiswa tentang pengelolaan bantuan studi akhir bagi mahasiswa asal Deiyai di Kota Jayapura.
2. Untuk menjelaskan tanggapan Badan Pengurus Tujuh Ikatan Mahasiswa tentang pengelolaan bantuan studi akhir asal Deiyai di Kota Jayapura .

1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Akademis/Teoritik

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai penelitian dan pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan ilmu sosial dan politik serta mendorong transparansi untuk menjamin tata kelola yang baik, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. dalam akuntansi dan dukungan penelitian masa depan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah pada umumnya dan Deiyai

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi, Penulisan skripsi dengan judul Transparansi Pengolaan Beasiswa Penyelesaian Studi Akhir Asal Kabupaten Deiyai di Kota Jayapura. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi mengenai landasan teori dan pengembangan hipotesis dan kerangka pikir /Model penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian, populasi dan sampel jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, Variabel penelitian, Devinisi penelitian, Devinisi operasional pengukuran ,Pengujian Intrumen.dan alat analisis